

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

Dalam Bab II ini, akan dibahas konsep dan teori yang berhubungan dengan kajian atau permasalahan penelitian, seperti kajian Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), kajian Literasi, kajian Literasi Politik, Kajian PKN sebagai pendidikan politik.

2.1 Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)

2.1.1. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)

Organisasi yang terdapat di sekolah-sekolah tingkat SLTP dan SLTA sebelum lahirnya OSIS memiliki berbagai macam corak dan bentuk. Terdapat dua jenis organisasi siswa di sekolah-sekolah sebelum lahirnya OSIS: organisasi siswa yang dibentuk secara internal oleh sekolah itu sendiri, dan organisasi siswa yang dibentuk oleh organisasi siswa di luar sekolah. Beberapa organisasi siswa yang dibentuk dan mempunyai hubungan dengan organisasi siswa di luar sekolah mengarah pada hal-hal yang bersifat politis, sehingga kegiatan organisasi siswa tersebut dikendalikan dari luar sekolah. Melihat banyaknya macam organisasi siswa yang tumbuh dan berkembang pada saat itu, beberapa dari organisasi siswa tersebut kemungkinan besar dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi di luar sekolah. Dengan memberikan bekal keterampilan, kepemimpinan, kesegaran jasmani, daya kreasi, patriotisme, idealisme, kepribadian, dan budi pekerti luhur, pembinaan dan pengembangan generasi muda bertujuan mempersiapkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional. Melalui penerapan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) yang ditata secara terarah dan teratur, pembangunan wadah pembinaan generasi muda di lingkungan sekolah dapat dicapai.

Dalam Pasal 4 Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan juga dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Organisasi kesiswaan di sekolah berbentuk organisasi siswa intra sekolah.
- 2) Organisasi kesiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi resmi di sekolah dan tidak ada hubungan organisatoris dengan

organisasi kesiswaan di sekolah lain.

- 3) Organisasi siswa intra sekolah pada SMP, SMPLB, SMA, SMALB dan SMK adalah OSIS.
- 4) Organisasi siswa intra sekolah pada TK, TKLB, dan SDLB adalah organisasikelas.

Sebelum membahas lebih jauh tentang tugas dan peranan OSIS, perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa OSIS merupakan singkatan dari Organisasi Siswa Intra Sekolah, sebuah organisasi kesiswaan yang wajib dibentuk di setiap sekolah.

Organisasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Edgar Shein dalam bukunya yang berjudul *Organization Psychology* bahwa:

“Organisasi adalah suatu kegiatan mengadakan koordinasi secara rasional segala kegiatan sejumlah orang dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan yang sama melalui pembagian kerja dan fungsi, dan melalui tingkat hirarkis kekuasaan dan tanggung jawab” (Ali Syafullah dalam Syiddiq & Mujahidin, 2022)

Organisasi yang baik harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, organisasi harus terdiri dari lebih dari satu orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kedua, setiap anggota organisasi harus memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kekuasaan yang dimiliki, namun tetap fokus pada pencapaian tujuan akhir yang sama. Ketiga, organisasi harus memiliki tugas atau kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut. Keempat, tugas dan tanggung jawab tersebut harus direncanakan dan diprogram dengan baik untuk mencapai hasil yang memuaskan. Ini semua sesuai dengan penjelasan Edgar Shein mengenai organisasi.

Dari pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap organisasi minimal harus memiliki anggota atau pelaku, memiliki tujuan yang jelas, dan melaksanakan kegiatan tertentu. Hal ini juga berlaku untuk OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) sebagai suatu organisasi. OSIS berfungsi sebagai wadah tunggal bagi siswa untuk berkumpul berdasarkan minat, bakat, dan kecenderungan mereka dalam aktivitas dan kreativitas di luar program kurikuler. Meskipun program ekstrakurikuler

direncanakan oleh kepala sekolah, pelaksanaannya diberikan kepada pengurus OSIS (Adiwira, 2020, hlm. 66).

OSIS adalah suatu organisasi kesiswaan di mana anggotanya terdiri dari siswa-siswa yang mewakili setiap kelas dengan minimal dua perwakilan dari tiap kelas. Dari anggota-anggota ini, dilakukan pemilihan untuk menentukan ketua OSIS, wakil ketua, dan pembantu ketua yang dikenal sebagai seksi-seksi dalam menjalankan kegiatan. Selain pengurus OSIS, Pembina OSIS juga merupakan bagian integral dari keanggotaan OSIS. Pembina OSIS terdiri dari kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang bertugas sebagai ketua dan wakil Pembina, serta guru-guru yang bergantian menjadi anggota Pembina OSIS.

Pembina OSIS memiliki fungsi sebagai pengatur, perencana, dan motivator bagi kegiatan-kegiatan OSIS, sementara pelaksana kegiatan tersebut adalah pengurus OSIS. Demikianlah gambaran OSIS sebagai organisasi dilihat dari segi keanggotaan dan kepengurusannya. Jika dilihat dari tujuan dan sasaran pembinaan kesiswaan adalah sebagai berikut:

- a. Mengusahakan agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- b. Meningkatkan peran serta dan inisiatif siswa.
- c. Menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa dari pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam sekolah.
- d. Memantapkan kegiatan ekstrakurikuler dalam menunjang pencapaian kurikulum.
- e. Meningkatkan apresiasi dan penghayatan seni menumbuhkan sikap berbangsa dan bernegara.
- f. Meningkatkan kesegaran jasmani dan rohani.
- g. Serta menumbuhkan dan mengembangkan semangat.

OSIS merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan pembinaan kesiswaan. Tujuan pembinaan kesiswaan ini tercantum dalam Pasal 1 Permendiknas RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tujuan Pembinaan Kesiswaan yaitu:

- a. Mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat dan kreativitas.
- b. Memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif yang bertentangan dengan tujuan pendidikan
- c. Mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian presentasi unggulan sesuai bakat dan minat
- d. Menyiapkan siswa agar mnejadi warga masyarakat yang berkahlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madank (*civil society*).

OSIS bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal. Dengan demikian, kepribadian siswa yang baik dapat terwujud, membantu mereka terhindar dari pengaruh negatif dan mempersiapkan mereka untuk menjadi warga negara yang baik. Selain itu, OSIS juga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan sekolah, sehingga sekolah tidak mudah terkena pengaruh negatif yang bertentangan dengan tujuan pendidikan (Ma'ruf, 2012, hlm. 99).

Dengan adanya tujuan OSIS yang diharapkan dapat memunculkan bibit-bibit generasi muda yang unggul dalam nilai keagamaan, sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab sehingga dapat memunculkan jiwa kepemimpinan, OSIS perlu dan wajib menyelenggarakan pembinaan kesiswaan. Pembinaan ini dilakukan dengan memberi bekal dan kemampuan kepada siswa untuk mengembangkan potensi mereka. Melalui organisasi ini, diharapkan dapat membawa perubahan pada diri siswa sebagai upaya pengembangan karakter. Siswa akan belajar berdemokrasi secara langsung dalam organisasi, meskipun dalam lingkup terbatas, namun ini sudah cukup baik untuk siswa sekolah menengah pertama yang masih berusia remaja.

2.1.2. Peranan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)

Sebagai salah satu upaya pembinaan kesiswaan, OSIS memiliki peranan sebagai berikut:

- a) Sebagai Wadah OSIS merupakan satu-satunya wadah kegiatan siswa di sekolah.

Oleh sebab itu, OSIS dalam mewujudkan fungsinya sebagai wadah harus melakukan upaya-upaya bersama-sama dengan jalur yang lain, misalnya latihan kepemimpinan siswa yang bersifat ekstrakurikuler. Tanpa saling bekerja sama dengan upaya-upaya lain, peranan OSIS sebagai wadah kegiatan siswa tidak akan berlangsung.

- b) Sebagai Penggerak Motivator adalah perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan, semangat partisipasi untuk berbuat, dan pendorong kegiatan bersama dalam mencapai tujuan. OSIS akan tampil sebagai penggerak apabila para pembina dan pengurus mampu membawa OSIS selalu memenuhi kebutuhan yang diharapkan, yaitu menghadapi perubahan, memiliki daya terhadap ancaman, memanfaatkan peluang dan perbuahan, dan yang terpenting adalah memberikan kepuasan kepada anggota. Dengan kata lain manajemen OSIS mampu memainkan fungsi intelektualnya, yaitu kemampuan para pembina dan pengurus dalam mempertahankan dan meningkatkan keberadaan OSIS baik secara internal maupun eksternal. Apabila OSIS dapat berfungsi demikian, maka sekaligus OSIS berhasil menampilkan peranan sebagai motivator.
- c) Peranan yang bersifat preventif Apabila peran yang bersifat intelek dalam arti secara internal OSIS dapat menggerakkan sumber daya yang ada dan secara eksternal mampu beradaptasi dengan lingkungan seperti menyelesaikan persoalan perilaku menyimpang siswa dan sebagainya. Dengan demikian secara preventif OSIS berhasil mengamankan sekolah dari segala ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar. Peranan preventif OSIS akan terwujud apabila peranan OSIS sebagai pendorong lebih dahulu harus dapat diwujudkan.

OSIS memiliki beberapa peran penting di lingkungan sekolah menengah. Sebagai wadah bagi siswa untuk bekerja sama dalam organisasi, OSIS memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dan berkolaborasi. Selain itu, OSIS juga berperan sebagai penggerak atau motivator, di mana peran ini tercapai jika pembina dan pengurus OSIS mampu memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh warga sekolah. Terakhir, OSIS memiliki peran preventif, yang berarti OSIS harus mampu meminimalisir pelanggaran dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar sekolah.

2.2 Kajian Literasi

2.2.1 Pengertian Literasi

Literasi adalah tata sosial yang melembaga dalam interaksi manusia dengan teks. Sebagai institusi sosial, literasi memiliki kekuatan distribusi dan regulasi, mirip dengan institusi lainnya, yang berarti literasi tidak hanya bersifat individual tetapi juga mempengaruhi dan diatur oleh masyarakat. Literasi tidak hanya sekadar keterampilan pribadi atau atribut individu, dan bukan hanya urusan teknologi, meskipun memerlukan sarana produksi fisik dan sosial. Dengan kata lain, literasi melibatkan lebih dari sekadar kemampuan membaca dan menulis; literasi mencakup kemampuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan berinteraksi dengan simbol dan lambang bahasa (Ansori, D. S., & Damaianti, V. S. 2021, hlm. 14).

Literasi melibatkan keterampilan berbahasa tingkat tinggi, yang mencakup kemampuan untuk berinteraksi dengan simbol dan lambang bahasa, serta menginterpretasikan makna yang terkandung di dalamnya. Literasi memiliki makna sosial yang luas, dilakukan secara massal dan melembaga, yang berarti bahwa literasi tidak hanya penting pada tingkat individu tetapi juga pada tingkat sosial dan komunitas. Literasi adalah cara di mana informasi dan pengetahuan disebarluaskan dan diatur dalam masyarakat.

O'Sullivan dkk. (1994: 170) mendefinisikan literasi sebagai sebuah institusi sosial menulis atau komunikasi, yang merupakan pelembagaan kegiatan menulis dan bentuk komunikasi lain di luar berbicara (dalam Andriani R, 2021). Definisi ini menekankan bahwa literasi adalah lebih dari sekadar kemampuan teknis untuk membaca dan menulis; literasi adalah cara di mana masyarakat mengatur dan memanfaatkan komunikasi tertulis untuk mencapai tujuan sosial.

Interaksi dengan teks mencakup pelembagaan perilaku manusia dalam memahami simbol-simbol dalam berbagai dimensi kehidupan. Ini berarti bahwa literasi melibatkan kemampuan untuk memahami dan menginterpretasikan teks dalam berbagai konteks, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Teks dipahami sebagai lambang sosial serta sarana kepentingan manusia di medan sosial, yang berarti bahwa teks adalah alat yang digunakan oleh manusia untuk

berkomunikasi, berbagi pengetahuan, dan mencapai tujuan bersama dalam masyarakat (Ansori, D. S., & Damaianti, V. S. 2021, hlm. 14).

Dengan demikian, literasi tidak hanya penting untuk pengembangan individu tetapi juga untuk perkembangan sosial dan komunitas. Literasi memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam masyarakat, memahami dan mempengaruhi dunia di sekitar mereka, dan mencapai tujuan bersama. Literasi adalah dasar dari pendidikan dan perkembangan sosial, dan penting untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

Keterampilan literasi merupakan keterampilan yang dibutuhkan setiap orang untuk mampu menghadapi kompleksitas informasi, saat ini dan di masa depan. Setiap orang harus dapat memutuskan sendiri informasi apa yang mereka butuhkan untuk masa depan mereka. Memilih informasi bukanlah tugas yang mudah saat ini. Membutuhkan kemampuan kognitif. Pentingnya literasi tidak hanya sekedar memberikan jati diri seseorang dalam hal kemampuan, namun juga sebagai sarana dan alat untuk memecahkan permasalahan kehidupan dan memajukan bidang yang ditekuninya. Melalui kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, seseorang dapat memahami simbol-simbol dalam pesan, mengakses informasi dari berbagai sumber, dan memecahkan permasalahan dalam kehidupan (Ansori, D. S., & Damaianti, V. S. 2021, hlm. 19).

2.2.2 Pendidikan Literasi

Literasi adalah inti dari pendidikan, seperti halnya jantung dalam tubuh manusia yang mengatur aliran darah. Kehadirannya sangat penting, sebagaimana dampak yang ditimbulkan ketika seseorang mengalami masalah pada jantung. Literasi menjadi kunci untuk mengalirkan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan. Setiap siswa dapat mengakses pengetahuan baru di berbagai bidang dan bahasa jika mereka memiliki keterampilan literasi yang baik. Secara metaforis, literasi memompa kehidupan intelektual bagi setiap pembelajar dalam berbagai disiplin ilmu. Literasi tidak terbatas pada ilmu bahasa atau pendidikan semata, tetapi relevan dalam semua bidang pengetahuan lintas disiplin (Ansori, D. S., & Damaianti, V. S. 2021, hlm. 23).

Maka sangat penting literasi dibangun dan terus dihidupkan supaya pendidikan dan pengetahuan dalam semua bidang dapat terus maju. Kecepatan dalam penguasaan suatu keilmuan dan dalam mencerna suatu informasi merupakan implikasi dari literasi. Akan tetapi literasi hanya sekedar menjadi kompetensi yang secara aplikatif digunakan untuk meraih informasi, ini berlaku untuk seorang sarjana yang di luar sarjana bahasa. (Ansori, D. S., & Damaianti, V. S. 2021, hlm. 24). Biapun begitu literasi dapat menjadi jawaban masa depan atas segala persoalannya. Beberapa kompetensi yang disarankan Unesco (2017, 2019) untuk dimasukkan ke dalam Kurikulum pendidikan agar dapat menghadapi persoalan di masa depan diantaranya *creatyvity, communication, critical thinking, problem solving, curiosity, metacognition; digital, technology, and ICTs skills; basic, media, information, financial, scientific literacies and numeracy, cross-cultural skills, leadership, global awareness; initiative, self-derection, perseverance, responsibility, accountability, adaptability; and knowledge of discipline, STEM mindset*. Jika diamati, kemampuan tersebut lebih banyak terfokus pada aspek emosional dan keterampilan motorik dibandingkan pada aspek kognitif. Ini menunjukkan bahwa tantangan di masa depan memerlukan kesiapan mental dan sikap yang mampu beradaptasi dengan perubahan serta memiliki keterampilan motorik yang beragam (Ansori, D. S., & Damaianti, V. S. 2021, hlm. 25).

Maka dalam praktiknya bukan hanya keilmuan yang perlu ditambah dan diperbaharui terus menerus. Melaikan keterampilan sangat perlu ditambah agar bisa bertahan dan menjadi petarung di masa depan. Untuk meningkatkan literasi dapat diperoleh tidak hanya dalam pendidikan formal melankan juga dalam berbagai kegiatan-kegiatan sosial, seperti dalam buku bacaan atau berita dimedia sosial.

Di negara ini, wujud dari upaya meningkatkan pendidikan literasi dengan adanya program pemerintah yakni Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Antono, 2017). Dasar hukum untuk pelaksanaan literasi di sekolah sangat lemah, terutama jika dibandingkan dengan regulasi dan program di negara-negara maju. Pemerintah seharusnya mengeluarkan landasan hukum yang

lebih kuat agar program literasi di sekolah benar-benar menjadi bagian penting dari sistem pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kebijakan dan program literasi di Indonesia tidak pernah bertahan lama, tidak konsisten, dan tidak berkelanjutan, karena aspek hukum yang mendukungnya juga kurang jelas atau tidak konkret (Ansori, D. S., & Damaianti, V. S. 2021, hlm. 166).

Literasi juga merupakan keterampilan yang penting untuk masa depan, karena diperlukan untuk memprediksi dan memberikan asumsi terhadap dinamika dan perkembangan global yang akan dihadapi umat manusia, berdasarkan akses informasi yang tersedia. Literasi masa depan melibatkan isu-isu global dan peluang yang harus dimanfaatkan agar seseorang bisa tetap kompetitif, termasuk strategi dalam menghadapi perubahan di masa depan. Fokus utama literasi masa depan adalah kemampuan untuk mengantisipasi dan menemukan solusi bagi masalah-masalah global. Dengan kata lain, literasi masa depan harus mampu merumuskan cara hidup yang lebih baik di masa mendatang dan menghindarkan kita dari berbagai ancaman terhadap sistem dan nilai-nilai kehidupan manusia (Ansori, D. S., & Damaianti, V. S. 2021, hlm. 176).

2.2.3 Literasi Digital

Literasi digital merupakan salah satu indikator penting dalam pendidikan dan kebudayaan yang bertujuan untuk mengembangkan pola pikir kritis dan kreatif pada peserta didik. Literasi digital mendorong siswa untuk beralih dari sekadar penerima informasi yang pasif menjadi pengguna yang aktif. Literasi digital melibatkan kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan berbagai informasi secara luas dan bebas melalui bantuan teknologi digital. Namun, penggunaan ini harus tetap dalam batasan norma, etika, dan budaya. Agar bijaksana dalam menggunakan literasi digital dalam pendidikan, peserta didik perlu memperhatikan beberapa dasar, yaitu: dasar budaya (*culture*), kognitif (*cognitive*), konstruktif (*constructive*), komunikatif (*communicative*), tanggung jawab (*responsibility*), kreatif (*creative*), kritis (*critics*), dan tanggung jawab sosial (*social responsibility*). Pada dasar budaya, siswa harus mampu memahami beragam konteks dan budaya dalam penggunaan literasi digital. Pada dasar kognitif, siswa perlu menilai dan memilih konten literasi digital secara selektif. Pada dasar konstruktif, siswa harus aktif dalam menciptakan

informasi berdasarkan fakta. Dalam aspek komunikatif, siswa harus memahami cara kerja jaringan digital dan mampu berkomunikasi dengan baik. Dasar tanggung jawab mengharuskan siswa bertanggung jawab atas informasi yang mereka peroleh dan bagikan, serta memastikan informasi tersebut akurat dan bermanfaat. Pada dasar kreatif, siswa diharapkan dapat melakukan inovasi dan menciptakan hal-hal baru untuk memperluas pengetahuan. Dalam hal kritis, siswa tidak hanya menerima informasi dari media digital, tetapi juga harus mampu menyaring informasi yang baik, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terakhir, dasar tanggung jawab sosial mengharuskan siswa untuk bijak dalam bermedia sosial secara digital. Kesimpulannya, literasi digital memiliki peran yang sangat luas dan signifikan dalam pendidikan. Oleh karena itu, peserta didik harus memahami dan menguasai dasar-dasar literasi digital agar dapat memanfaatkan teknologi digital secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan (Harjono, 2018).

Literasi digital adalah keterampilan hidup yang tidak bisa dipisahkan dari kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Literasi digital bukan hanya tentang kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup keterampilan menerima dan berbagi informasi, berkomunikasi dengan baik, bersosialisasi, bersikap bertanggung jawab, berpikir kritis, serta menjadi kreatif dan inspiratif. Semua kompetensi digital ini penting untuk mencapai tujuan pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan hidup (Anugraha, 2020).

2.2.4 Pembelajaran Digital

Pembelajaran digital adalah sebuah sistem pendidikan yang ada saat ini, yang bertujuan untuk memfasilitasi proses belajar secara luas dan beragam. Ada banyak teknik dan media pembelajaran yang bisa digunakan untuk meningkatkan minat belajar siswa. Oleh karena itu, pendidik perlu berinovasi agar peserta didik tidak merasa bosan dengan teknik dan media pembelajaran yang monoton dalam jangka waktu lama. Melalui fasilitas yang disediakan oleh sistem digital ini, peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Kehadiran sistem digital ini merupakan tantangan besar bagi para pendidik. Pendidik yang tidak berinovasi akan tertinggal dan bahkan bisa tersaingi oleh peserta didik yang rajin dan kreatif, karena mereka dapat memanfaatkan fasilitas dan sumber informasi yang luas dan mudah diakses

melalui sistem digital. Kehadiran teknologi digital membantu penyampaian materi pembelajaran menjadi lebih inovatif, tidak hanya dalam bentuk verbal tetapi juga dalam berbagai bentuk lain seperti teks, visual, audio, gerakan, dan animasi (Yudistira dkk, 2020).

Kemajuan akses informasi dalam dunia pendidikan sangat terlihat melalui pembelajaran berbasis internet. Akses informasi dan komunikasi dilakukan sepenuhnya melalui web dan platform digital, mencakup semua aspek kegiatan pembelajaran, termasuk materi yang dirancang secara elektronik. Pembelajaran digital dapat dilakukan secara sinkron dan asinkron. Pembelajaran sinkron melibatkan interaksi langsung antara pendidik dan siswa di lokasi yang berbeda, terhubung melalui internet, yang biasa disebut pembelajaran daring (dalam jaringan). Sementara itu, pembelajaran asinkron dilakukan secara digital melalui *mailing list*, grup diskusi, *newsgroup*, dan papan buletin (Narfin dan Hudaidah, 2021).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan literasi digital dalam pelaksanaan pendidikan tidak bisa ditunda meskipun terjadi pandemi, seperti saat wabah COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pendidikan tidak boleh berhenti karena merupakan pilar fundamental bagi suatu bangsa agar kuat dalam menghadapi berbagai perubahan. Pendidikan adalah proses yang berlangsung seumur hidup (E. Silalahi dkk, 2022, hlm. 9).

2.2.5 Literasi Digital di Sekolah

Generasi Z, juga dikenal sebagai generasi *Post Millennial* (1995-2010), adalah generasi yang sangat akrab dengan internet, sering berinteraksi di dunia maya, dan menggunakan *smartphone*. Sementara itu, Generasi Alpha (2010-2025) adalah generasi yang melakukan berbagai aktivitas secara digital dan sangat tertarik dengan teknologi. Kekhawatiran terhadap kedua generasi ini adalah dampak negatif dari perkembangan digital. Banyak remaja terjebak dalam perilaku tidak sehat di internet, seperti mengunjungi situs-situs dengan konten negatif. Selain itu, penggunaan internet yang berlebihan untuk mencari hiburan daripada konten edukatif dapat menurunkan minat belajar siswa. Anak-anak usia sekolah yang sering berinteraksi dengan internet juga rentan terhadap ancaman yang merusak

ekosistem digital, seperti berita palsu, ujaran kebencian, pencurian data, dan perundungan di dunia maya. Yang paling berbahaya adalah bahwa internet dapat menyebabkan kecanduan dan kesulitan dalam mengatur waktu, yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Di sisi lain, kemajuan teknologi informasi juga menawarkan prospek yang cerah, seperti peluang bisnis yang semakin luas dan terbukanya lapangan pekerjaan baru yang berbasis digital (E. Silalahi dkk, 2022, hlm. 108).

Semua pihak yang terlibat dalam pendidikan, termasuk guru, pengawas, komite, dan kepala sekolah, harus bekerja keras untuk menyelaraskan literasi digital, seperti aspek keamanan, keterampilan, etika, dan budaya digital, serta berusaha mengurangi kesenjangan digital di antara siswa dengan mendukung pengembangan literasi digital di sekolah. Untuk mendukung keterampilan ini, pendidik perlu secara spesifik mengenali dan mengatasi hambatan yang mungkin menghalangi pemanfaatan teknologi di kelas, seperti akses yang terbatas, fasilitas yang kurang memadai, kurangnya motivasi, dan perbedaan tingkat pengalaman di antara siswa. Siswa dengan latar belakang, kompetensi, dan kemampuan yang berbeda memerlukan guru untuk berinovasi dalam merancang pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi. Literasi digital tidak terbatas pada penggunaan komputer atau pembelajaran di laboratorium saja, terutama jika fasilitas dan akses masih terbatas. Guru dapat menerapkan literasi digital secara kreatif dalam setiap mata pelajaran, misalnya dengan menggabungkan teknologi sederhana dalam pelajaran bahasa, eksplorasi ilmu pengetahuan, perhitungan matematika, dan berbagai keterampilan pedagogi lainnya, sehingga siswa termotivasi untuk mengembangkan keterampilannya. Di era yang semakin digital, orang tua juga perlu diajak untuk berperan dalam meningkatkan pemahaman konsep literasi digital dan penggunaan sumber daya digital, agar dapat mendampingi perkembangan literasi digital anak secara positif (E. Silalahi dkk, 2022, hlm. 110).

2.3 Literasi Politik

2.3.1 Pengertian Literasi Politik

Literasi politik merupakan suatu konsep untuk mengetahui bagaimana dan sejauh apa individu memahami terkait ruang gerak dalam dunia politik, serta keterlibatan seseorang terkait kehidupan politik. Hal ini berkaitan dengan pendapat

Bernard Crick (2000) yang mendefinisikan literasi politik sebagai kombinasi yang terdiri atas pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap (*attitude*), yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan politik (dalam Hernitasari, 2023). Dalam konteks ini, literasi politik memungkinkan warga negara untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana dunia politik itu berjalan, sekaligus mereka dapat belajar terkait keikutsertaan mereka dalam dunia politik.

Menurut Andrew (2008), literasi politik terdiri dari pengetahuan, nilai, dan keterampilan. Menurut Westhom (1990), literasi politik pada dasarnya adalah kemampuan warga negara yang dilatih untuk memenuhi peran mereka dalam kehidupan demokrasi. Denver & Hands (1990) mengatakan literasi politik berarti memahami proses politik dan masalah politik. Di mana warga negara secara efektif memenuhi tugas kewarganegaraan mereka dengan pengetahuan politik yang relevan Cassel & Lo (1997) mendefinisikan literasi politik sebagai keduanya keahlian politik dan kesadaran politik, yang pada akhirnya mengacu pada seberapa baik seseorang memperhatikan dan memahami politik (dalam Karim et al. 2014, hlm. 5).

Berkaitan dengan literasi politik, Bochel (2015) mengatakan bahwa dalam literasi politik terdapat tiga komponen utama yang sangat penting untuk membangun literasi politik, ketiga komponen tersebut ialah pengetahuan politik, partisipasi politik, dan minat politik (Hernitasari, 2023). Dari penjelasan tersebut, literasi politik juga mengacu terhadap keterlibatan individu terkait pemahaman serta partisipasi yang dilakukan secara langsung dalam dunia politik. Dalam hal ini, setiap warga negara memiliki hak dan kewajibannya dalam keikutsertaannya serta membangun keselarasan dalam dunia politik.

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai literasi politik tersebut semuanya berfokus terhadap peran serta individu dalam dunia politik dengan dibekali pemahaman, keterampilan, serta partisipasi secara nyata yang dilakukan oleh setiap individu. Pada dasarnya, penelitian literasi politik ini dikaitkan dengan bagaimana pemilihan dilakukan di suatu negara (dalam hal ini dunia persekolahan), yang tentunya akan memengaruhi siapa yang berpartisipasi dalam politik di parlemen dan pemerintahan (dalam hal ini organisasi dan seajarnya). Oleh karena itu, literasi

politik harus mencakup lebih dari sekedar pemahaman individu tentang politik, itu harus mendorong mereka untuk terlibat secara aktif di ruang publik dengan menilai dan mengevaluasi lembaga negara dan institusi politik. Jadi, menanamkan pemahaman dan pengetahuan literasi politik pada setiap orang dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang demokratis.

Dalam hal ini, literasi politik yang diangkat dalam penelitian berkaitan dengan sejauh mana peran Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dalam membentuk literasi politik di era digital seperti saat ini, khususnya OSIS di sekolah SMA Pasundan Cikalongkulon.

2.3.2 Indikator Literasi Politik

Indikator literasi politik merupakan istilah yang merujuk terhadap aspek yang mencerminkan kemampuan individu atau kelompok dalam memahami, menganalisis, dan berpartisipasi dalam proses politik. Berikut merupakan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai literasi politik, berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang didapatkan dari beberapa sumber:

1. Kompetensi Kewarganegaraan yang Mencerminkan Literasi Politik

Kemampuan untuk memahami dan mempertanyakan narasi politik serta mengenali aktor-aktor di balik isu-isu politik. Ini termasuk kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam diskusi politik dan mengambil keputusan yang normatif (Mutia F dalam unair.ac.id, 2024).

2. Pemahaman Terhadap Isu Politik Kontemporer

Tingkat pengetahuan tentang isu-isu terkini yang mempengaruhi masyarakat, seperti kebijakan publik, pemilu, dan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga mencakup kemampuan untuk menganalisis dampak dari isu-isu tersebut terhadap kehidupan sehari-hari (Haryani T, et al, 2024).

3. Keterampilan Mengelola Informasi Politik

Kemampuan untuk memilah informasi yang relevan dan akurat dari berbagai sumber, termasuk media sosial dan berita mainstream. Ini penting untuk menghindari penyebaran hoaks dan informasi yang menyesatkan (Rizayanto O, 2023).

4. Partisipasi Politik

Tingkat keterlibatan dalam kegiatan politik, baik secara konvensional (seperti pemilu) maupun non-konvensional (seperti demonstrasi atau kampanye sosial). Partisipasi ini mencerminkan kesadaran politik individu dan komitmen terhadap perubahan sosial (Pambayun K, et al, 2021).

5. Sikap Toleransi dan Penghargaan Terhadap Perbedaan Pandangan Politik

Kemampuan untuk menghargai pandangan politik yang berbeda dan bersikap toleran terhadap perbedaan budaya, agama, dan latar belakang sosial lainnya. Ini merupakan indikator penting dalam membangun masyarakat yang inklusif (Mutia F dalam unair.ac.id, 2024).

6. Keterlibatan dalam Pendidikan Politik

Partisipasi dalam program pendidikan politik formal maupun non-formal yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang sistem politik dan hak-hak sebagai warga negara. Pendidikan ini dapat dilakukan melalui sekolah, komunitas, atau organisasi masyarakat sipil (Imrani R, et al, 2023).

Maka dari itu, indikator literasi politik dinilai sangatlah penting untuk menilai seberapa baik individu atau kelompok dapat berfungsi dalam konteks demokrasi. Peningkatan literasi politik di kalangan generasi muda (dalam hal ini ruang lingkup pendidikan formal), terutama di era informasi digital saat ini, menjadi sangat krusial untuk memastikan partisipasi yang aktif dan informatif dalam proses politik.

2.3.3 Contoh Literasi Politik

Dalam pelaksanaannya, literasi politik dapat diberlakukan dengan berbagai cara, salah satunya ialah melalui media yang pernah dilaksanakan di Kota Surabaya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan bertajuk Program Desa Peduli Pemilu. Program ini dilaksanakan oleh KPU Kota Surabaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pemilu. Melalui program ini, masyarakat diajarkan mengenai cara memahami informasi pemilu dan berpartisipasi secara aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini mampu meningkatkan literasi politik masyarakat, terutama menjelang pemilu serentak 2024 (Imrani R, et al, 2023).

Program Desa Peduli Pemilu yang dilaksanakan di Kota Surabaya oleh KPU meliputi (1) *Source* (sumber/komunikator) yaitu narasumber-narasumber yang diundang oleh KPU untuk memberikan pesan terkait program yang dilaksanakan; (2) *Message* (pesan) yaitu salah satu unsur terpenting dalam kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan. Pesan yang dimaksud berisikan materi dan kiat-kiat terkait program dan fasilitator yang digunakan sebagai pedoman memberikan pendidikan pemilu kepada masyarakat; (3) *Channel* (media/saluran), media diperlukan guna menyebarkan informasi terkait pemilu, dalam hal ini media disebarkan melalui website KPU Kota Surabaya guna memberikan hasil yang baik terkait kegiatan sosialisasi dan pembekalan; (4) *Receiver* (audiens/penerima), audiens diperlukan guna mengukur tingkat keberhasilan kegiatan program ini (Imrani R, et al, 2023).

2.4 Kajian PKN sebagai Pendidikan Politik

2.4.1. Pengertian PKN

Pendidikan Kewarganegaraan ialah pendidikan yang berfokus terhadap pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban seorang warga negara. Segala sesuatu dalam ranah kewarganegaraan harus sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa, serta tidak boleh melenceng dari apa yang diharapkan. Pendidikan Kewarganegaraan ada guna melatih para siswa dalam berpikir kritis, analitis, bersikap serta berindak demokratis dalam menjalankan kehidupan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Damri & Putra F E, 2020). Sejalan dengan

itu Samsuri (2011) mendefinisikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan untuk generasi muda agar menjadi warga negara yang berkompeten. Dalam hal ini, generasi muda yang memiliki pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang diperlukan guna berpartisipasi aktif dalam masyarakat (dalam Damri & Putra F E, 2020).

Dengan adanya Pendidikan Kewarganegaraan, siswa dididik untuk memahami, menghayati dan menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai pijakan berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di ruang lingkup masyarakat. Dengan demikian, akan terlahir individu sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab dan juga dapat diandalkan. Pendidikan Kewarganegaraan juga merupakan program mata pelajaran yang akan membentuk individu warga negara untuk mencapai tujuan menjadikan masyarakat Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Trisiana A, 2020).

2.4.2. Pengertian Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan konsep yang penting dalam sistem sosial dan politik, yang bertujuan untuk membina individu agar memahami dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Pendidikan Politik ada untuk usaha dan upaya pembinaan guna meningkatkan pengetahuan politik warga negara sehingga terciptanya warga negara yang mencintai serta menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik. Selain dari pada itu, pendidikan politik bertujuan untuk mendidik warga negara terkait sistem politik agar dapat berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan politik (Kajian Pustaka, 2020).

Sejalan dengan itu, Kantaprawira (2006) mendefinisikan pendidikan politik sebagai aktivitas atau tindakan yang bertujuan untuk membangun nilai-nilai moral dan orientasi politik seseorang. Pendidikan politik mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam perpolitikan negara sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab (dalam Pahlevi & Amrurrobi, 2020).

Pendidikan politik berbeda dari sosialisasi politik. Pendidikan politik bertujuan untuk membuat masyarakat berdaya dan mampu, tidak hanya memahami politik, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diperkuat oleh

pendapat Kartono (1996), menurutnya proses sosialisasi politik dapat dipengaruhi oleh pendidikan politik sehingga hal tersebut dapat mengubah sosialisasi politik. Sehingga, masyarakat dapat dengan mudah memahami nilai etis dalam dunia politik serta mampu mempraktikannya dalam kehidupan politik (dalam Pahlevi & Amrullohi, 2020).

Pendidikan politik sendiri dapat dilakukan dengan model *pre-emptif* dan preventif. Dalam hal ini, *pre-emptif* dapat diartikan sebagai upaya awal dalam mencegah terjadinya masalah yang dapat terjadi sehingga akan berdampak panjang kedepannya. Upaya *pre-emptif* dalam pendidikan politik ialah dengan memberikan stimulus terkait norma kebaikan dalam kehidupan (Alam, 2018).

Sedangkan, pendidikan politik dengan model preventif merupakan upaya pencegahan suatu masalah pendidikan politik terhadap individu yang biasanya belum tahu atau rentan terhadap suatu masalah politik. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya hal-hal negatif yang dapat merusak ataupun merugikan dalam konteks politik (Pahlevi & Amrullohi, 2020).

Berdasarkan beberapa sumber bacaan diatas pendidikan politik merupakan suatu pendidikan yang mengajarkan kepada warga negara terkait sistem politik dalam suatu negara yang bertujuan untuk menciptakan warga negara yang memahami, mencintai, serta berperan aktif dalam suatu sistem politik. Pendidikan politik juga merupakan suatu pendidikan yang dapat mencegah terjadinya suatu penyimpangan yang dapat merusak ataupun merugikan suatu sistem politik. Maka dari itu, pendidikan politik penting untuk terciptanya individu yang memiliki nilai moral dan nilai etis serta bertanggung jawab dalam membangun sistem politik di suatu negara.

2.4.3. Peran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pendidikan Politik

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian dari pendidikan formal yang ada di Indonesia, sekaligus pendidikan politik dalam rangka membentuk warga negara yang baik dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik merupakan salah satu

bentuk upaya mensosialisasikan kehidupan politik dengan teori pendidikan (Razali et al, 2022).

Menurut Hemafitria dan Hadi Rianto (2015), ada dua jenis pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan secara keseluruhan yang dikenal sebagai pendidikan kewarganegaraan secara utuh dan yang kedua adalah indoktrinasi politik. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian dari pendidikan politik, yang menekankan bagaimana seorang warga negara yang baik berpartisipasi dalam kehidupan politik bangsanya. Sementara yang dimaksud dengan indoktrinasi politik merupakan pendidikan politik yang lebih menekankan pembelajaran ideologi politik tertentu yang bertujuan untuk merasionalisasi dan menjustifikasi rezim tertentu.

Pendidikan kewarganegaraan juga memiliki peranan penting dalam terciptanya suatu pendidikan politik. Hal ini ditandai dengan peran dari pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga negara terkait hak dan kewajiban warga negara dalam mencintai tanah air serta agar terciptanya warga negara yang dapat berkontribusi bagi negaranya. Sejalan dengan itu, Pendidikan politik memiliki tujuan untuk terciptanya warga negara yang dapat berperan aktif dalam sistem politik di suatu negara. Tentunya kedua hal ini memiliki keterkaitan yaitu demi terciptanya suatu sistem politik yang baik, maka harus adanya peran dari warga negara yang mana memiliki hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan politik merupakan dua koridor ilmu yang sangat berkaitan. Hal ini dapat kita lihat dari konteks pemilihan umum, yang mana pendidikan kewarganegaraan disini berperan sebagai pendidikan yang berfokus terhadap kegiatan dan tindakan warga negara dalam berkontribusi bagi negara. Disisi lain, pendidikan politik berperan sebagai ilmu yang memberikan pemahaman terkait hak dan kewajiban warga negara untuk memilih salah satu pilihan dalam kontestasi pemilihan umum. Maka dari itu, pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan pemahaman terhadap warga negara terkait hak dan kewajibannya untuk berpartisipasi dalam politik. Melalui pendidikan

kewarganegaraan dan pendidikan politik diharapkan warga negara dapat memaksimalkan pilihannya dalam partisipasi politik.

2.5 Penelitian Terdahulu

Adapun dibawah ini penelitian yang terdahulu membahas terkait pembahasan yang berkonteks dengan literasi politik sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Zakiah Alamandra Leandry, 2022) bertujuan untuk menelaah **Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Literasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu Presiden Tahun 2019 Di Kota Bekasi**. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KPU kota Bekasi telah menjalankan perannya dengan cukup baik, hal tersebut dilihat dari segala macam upaya KPU Kota Bekasi dalam memberikan program sosialisasi yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2018.
2. Penelitian yang dilakukan oleh (Ida Mahardika, 2024) bertujuan untuk menelaah terkait **Pemahaman Literasi Politik Untuk Pemilih Pemula Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Pandeglang**. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya guru-guru di SMAN 1 Pandeglang telah berhasil memberikan pemahaman terkait literasi politik kepada siswa/i nya, hal ini ditunjukkan oleh pemaparan para guru SMAN 1 Pandeglang dengan menggunakan berbagai strategi seperti mengajak siswa/i untuk menganalisis informasi politik yang berkembang di lingkungan sekitar dan media sosial, serta strategi lainnya yang digunakan oleh para guru SMAN 1 Pandeglang yaitu dengan menampilkan video pada saat kegiatan belajar mengajar yang menunjukkan sikap positif sebagai warga negara yang aktif dalam politik. Pada akhirnya kedua strategi ini membuahkan hasil yang positif, sebagian besar pemilih pemula di SMAN 1 Pandeglang tertarik dan mampu menganalisis literasi informasi politik sebelum aktif berpartisipasi dalam kegiatan pemilu.
3. Penelitian yang dilakukan oleh (Angga Adiwira, 2020) bertujuan untuk menelaah terkait **Peran OSIS dalam Menumbuhkan Karakter Peduli Lingkungan di MTs Darul Hikmah Aceh Besar**. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwasannya (1) Peran OSIS dalam menumbuhkan karakter peduli lingkungan di MTs Darul Hikmah Aceh Besar terlihat pada peran OSIS sebagai wadah tempat siswa saling bekerjasama untuk mencapai tujuan, kemudian sebagai penggerak membantu sekolah menjalankan kegiatan yang telah direncanakan dan sebagai peranan yang bersifat preventif dapat meminimalisir perilaku siswa yang menyimpang dengan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh OSIS; (2) Realisasi program pelaksanaan karakter peduli lingkungan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang mana bertujuan menanamkan nilai karakter peduli lingkungan kepada siswa yang mana kesemuanya disusun dan dirincikan dengan melihat berbagai peluang dan hambatan dalam program ini; (3) Kendala dalam kegiatan ini adalah pola perilaku siswa yang sulit untuk diatur, kemudian sarana prasarana belum memadai dan lingkungan masyarakat sekitar yang masih kurang perhatian dalam memberikan kontribusi terhadap kegiatan karakter peduli lingkungan. Peran OSIS dalam menumbuhkan karakter lingkungan jika dilaksanakan dengan baik akan menanamkan nilai-nilai karakter melalui berbagai macam kegiatan OSIS baik kegiatan rutinan maupun kegiatan lainnya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh (Siti Nurlatifah, 2018) bertujuan untuk menelaah terkait **Peranan Organisasi Siswa Intra Sekolah (Osis) dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Siswa di MTs Raudatussyubban Sungai Lulut Kabupaten Banjar**. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter kepemimpinan siswa yang menjadi pengurus OSIS MTs Raudatussyubban Sungai Lulut Kabupaten Banjar, hal ini dapat dilihat dari program kerjanya. Hal ini, karena dengan adanya program kerja maka para pengurus OSIS akan dilatih untuk bertanggung jawab dengan melaksanakan setiap program kerja yang telah diberikan kepada mereka. Semua kegiatan OSIS memiliki peranan dalam membentuk karakter kepemimpinan para pengurusnya. Fungsi OSIS pada intinya sebagai satu-satunya wadah kegiatan para siswa di sekolah, sebagai motivator dan yaitu sebagai upaya preventif.
5. Penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad Ageza Pratama, 2021) bertujuan untuk menelaah terkait **Literasi Politik Dalam Media Sosial (Studi Fenomenologi Pengikut Akun Instagram @generasimelekipolitik dalam**

Kerangka Literasi politik). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya akun *Instagram* @generasimelekp politik telah menyajikan konten yang sesuai dengan tindakan dalam pendekatan literasi politik, yakni: informasi seputar politik; strategi pencarian informasi; gerakan mempublikasi informasi; dan mengevaluasi produk dari proses akhir politik. Penyajian informasi oleh akun *Instagram* @generasimelekp politik bersifat aplikatif sehingga literasi politik pengikut akun *Instagram* @generasimelekp politik dapat dipahami sebagai tindakan mengkolaborasikan elemen pengetahuan, efektivitas, dan sikap partisipatif untuk turut mengambil bagian dari sistem politik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui pengintegrasian antara konten dengan kegiatan akan memberikan ruang pengaplikasian pengetahuan politik bagi pengguna *Instagram*.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merujuk pada suatu konsep yang menggambarkan narasi atau pernyataan proposisi tentang struktur kognitif yang memandu pendekatan dalam memecahkan masalah yang telah diakui atau dirumuskan. Dalam konteks penelitian kualitatif, seorang peneliti berperan sebagai instrumen manusia, dan dalam menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi dan wawancara mendalam, peneliti aktif terlibat dan berinteraksi dengan sumber data. Oleh karena itu, peneliti kualitatif perlu memiliki pemahaman yang mendalam terhadap individu yang menyediakan data. Metode penelitian kualitatif cenderung melibatkan interaksi antar variabel pada objek penelitian, yang bersifat interaktif dan saling mempengaruhi. Dalam konteks ini, sulit untuk menentukan secara jelas mana variabel yang bersifat independen dan dependennya. (Murdiyanto, 2020 hlm.13). Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen manusia dan terlibat secara aktif dalam interaksi dengan sumber data melalui teknik pengumpulan seperti observasi dan wawancara mendalam. Peneliti perlu memiliki pemahaman yang mendalam terhadap individu yang menyediakan data. Dalam penelitiannya metode kualitatif bisa jadi menjadi sulit dikarenakan melibatkan hubungan antar variabel yang terletak pada objek penelitian, hal ini dikarenakan sulit untuk menentukan secara jelas mana variabel independen dan dependennya yang bersifat mempengaruhi dan interaktif.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

